

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Berencana sejak tahun 1970an sebagai upaya pengendalian penduduk. Kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera yang merupakan landasan hukum yang kokoh dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga Indonesia menuju penduduk tumbuh seimbang dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (BKKBN, 2016).

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan jumlah penduduk sebanyak 252.124.458 jiwa dengan luas wilayah 1.913.378,68 km² dan kepadatan penduduk sebesar 131,76 jiwa/km² (Depkes RI, 2015). Masalah yang terdapat di Indonesia adalah laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi. Perkiraan penduduk pertengahan (2013) sebesar 248,8 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,48%. Laju pertumbuhan ditentukan oleh kelahiran dan kematian dengan adanya perbaikan pelayanan kesehatan menyebabkan tingkat kematian rendah, sedangkan tingkat kelahiran tetap tinggi hal ini penyebab utama ledakan penduduk. Menekan jumlah penduduk dengan menggalakan program Keluarga Berencana (KB) (BPS, 2016).

Cakupan peserta KB baru dan KB aktif di Indonesia pada tahun 2014 dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 47.019.002. Peserta KB baru sebesar 7.761.961 (16,15%) meliputi suntik sebanyak 3.855.254 (49,67%), pil KB sebanyak 1.951.252 (25,14%), kondom sebanyak 441.141 (5,68%), implan sebanyak 826.627 (10,65%), IUD (*Intra Uterine Device*) sebanyak 555.241 (7,15%), Metode Operasi Wanita (MOW) sebanyak 116.384 (1,5%), Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 16.062 (0,2%). Sedangkan peserta KB aktif sebanyak 35.202.908 meliputi IUD sebanyak 3.896.081 (11,07%), MOW sebanyak 1.238.749 (3,52%), MOP sebanyak 241.642 (0,69%), implant sebanyak 3.680.816 (10,46%), kondom sebanyak 1.110.341 (3,15%), suntikan sebanyak 16.734.917 (47,54%), dan pil KB sebanyak 8.300.362 (29,58%) (Depkes RI, 2015).

Keberhasilan pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tidak terlepas dari peran Penyuluh Keluarga Berencana (yang disingkat dengan PKB) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (yang disingkat dengan PLKB) yang merupakan tombak di lapangan dalam menjabarkan visi dan misi program

kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang harus diterjemahkan dengan baik di lapangan sehingga masyarakat sebagai pihak penerima dan pengguna program dapat menikmatinya (BKKBN, 2016).

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) berupaya menekan angka kelahiran penduduk dan pada saat bersamaan berusaha meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup penduduk. Sejak dilaksanakan pada tahun 1970, program KB secara efektif mampu menurunkan angka kelahiran penduduk di Indonesia. Pada periode 1970-2016, angka kelahiran total (Total Fertility Rate, TFR) wanita Indonesia berhasil diturunkan dari 5,6 per wanita menjadi 2,6 per wanita. Laju pertumbuhan penduduk nasional menurun dari 2,34% pada periode 1971- 1980 menjadi 1,49% pada periode 1991-2000. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi juga berhasil ditingkatkan dari 15% pada 1970 menjadi 61% pada 2016. Dengan semangat kesadaran diri, umumnya masyarakat Indonesia telah mencari pelayanan KB secara mandiri, hanya 30% pasangan usia subur (PUS) yang termasuk kriteria keluarga miskin disubsidi pemerintah. Pelaksanaan program KB di lapangan mengalami penurunan sejak awal dekade 2000, ketika kebijakan desentralisasi diimplementasikan. Di daerah institusi pengelola program KB pengganti kantor BKKBN mulai diintegrasikan dengan institusi lain. Bahkan, ada daerah yang menilai KB bukan program yang penting dengan alasan untuk menggarap lahan yang sangat luas diperlukan jumlah penduduk banyak. Dengan alasan pemekaran wilayah, beberapa daerah justru berupaya meningkatkan jumlah penduduk untuk memenuhi persyaratan pembentukan kabupaten atau kota. Hal tersebut mencerminkan penurunan prioritas program KB dimata pemerintah daerah (BPS, 2016).

Data dari rekapitulasi pengguna KB di Kartasura bulan April (2015) sebanyak 2.062 (76,82%). Peserta KB dengan jumlah wanita usia subur menggunakan metode kontrasepsi 1584 peserta terdiri dari: IUD sebanyak 492 (23,86%), MOP sebanyak 8 (0,39%), MOW sebanyak 130 (6,30%), implan sebanyak 32 (1,55%), suntik sebanyak 687 (33,28%), pil KB sebanyak 207 (10,04%), dan kondom sebanyak 28 (1,36%). Sedangkan bukan peserta KB sebanyak 478 (23,18%). Pendidikan manfaat keluarga berencana sangat penting untuk menentukan kontrasepsi yang digunakan pada pasangan usia subur.

Oleh karena itu faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan kinerja PLKB menjadi penting untuk diteliti dalam mencapai sasaran strategis program tersebut di atas dan pencapaian visi, misi yang diemban oleh organisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kompetensi dan motivasi dalam melaksanakan tugas, salah satunya dengan penilaian kinerja pegawai (*Performance Appraisal*).

Penilaian kinerja (*Performance Appraisal*) adalah suatu proses yang memungkinkan organisasi mengetahui, mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja anggota-angotanya secara tepat dan akurat. Kegiatan ini sangat terkait dan berpengaruh terhadap keefektifan pelaksanaan aktivitas-aktivitas sumberdaya manusia dalam perusahaan, seperti promosi, kompensasi, pelatihan (training), pengembangan manajemen karir dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena fungsi penilaian kinerja dapat memberikan informasi penting kepada perusahaan untuk memperbaiki keputusan dan menyediakan umpan-balik kepada para karyawan tentang kinerja mereka yang sesungguhnya.

Muchlis (2013), Andre & Suhaji (2011), Wahyuni, dkk (2013), dan Susanto (2012) menemukan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Sehingga dalam peningkatan kinerja organisasi, maka sangat penting untuk meningkatkan kompetensi pegawai itu sendiri dengan cara melakukan pelatihan pelatihan terkait tupoksi pegawai.

Disiplin kerja seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya juga akan menentukan baik buruknya kinerja pegawai, sehingga akan berdampak terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu kedisiplinan juga harus ditanamkan secara terus menerus pada pegawai sehingga menjadikan disiplin sebuah kebiasaan. Disiplin kerja yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi. Harlie (2010), Zenbedri & Anik (2009), Muchlis (2013), Patiran (2010) juga menemukan faktor disiplin kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Seorang PLKB akan berusaha mencapai kinerja tertentu sesuai yang telah ditentukan atau yang dikehendaki organisasi, jika segala kebutuhannya dapat terpenuhi dari organisasi, maka mereka akan merasa senang dan puas dengan pekerjaannya. Karena, setiap PLKB yang merasa puas akan bekerja pada tingkat kapasitas yang penuh, sebab kepuasan tidak diukur dari pengakuan atasan atau pengembangan karier, namun dapat berwujud benda atau bukan benda (*reward*) di antaranya berupa imbalan jasa (gaji) yang diterima dari hasil kerjanya (Wursanto, 2016).

Dari hasil pengamatan di kabupaten nias barat bahwa awal permasalahan yang ditemukan antara lain kurangnya pemberian motivasi dari pimpinan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan KB, mengakibatkan menurunnya semangat kerja PLKB dalam melaksanakan berbagai rutinitas kerjanya, baik tingkat kehadiran pada jam-jam kerja, maupun pelayanan terhadap masyarakat yang semakin berkurang. Demikian pula insentif, honor, dukungan operasional yang semakin berkurang jika dibandingkan pada era sentralisasi (vertikal). Kenyataan lainnya, terdapat beberapa pegawai yang telah berprestasi, tetapi tidak

diberi imbalan, baik berupa pujian, materi, maupun penghargaan lainnya. Melalui advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi atau yang biasa disebut konseling, Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dapat meyakinkan masyarakat atau calon akseptor KB untuk ikut serta dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sehingga kseptor KB dapat meningkat (BKKBN, 2015).

Di lapangan, harapan besar yang dibebankan kepada Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana ternyata masih diliputi berbagai masalah yang menyangkut kinerja Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lapangan, antara lain meliputi: (1) kemampuan manajemen yang terbatas; (2) pelaksanaan tugas yang berorientasi angka kredit; (3) pengetahuan dan wawasan tentang program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang masih terbatas; (4) kemampuan mendorong partisipasi masyarakat yang tidak merata; (5) penampilan kerja yang belum memadai; (6) rasio Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana terhadap jumlah desa/kelurahan binaan yang kurang tepat; (7) masih kurangnya dana operasional Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; serta (8) masih kurangnya fasilitas Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan tanggungjawabnya.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan peneliti, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai Kinerja PKB/PLKB Dalam Mencapai Keberhasilan Keluarga Berencana Dengan Menggunakan Metode *Performance Appraisal* Di Kabupaten Nias Barat Tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja PKB/PLKB Dalam Mencapai Keberhasilan Keluarga Berencana Dengan Menggunakan Metode *Performance Appraisal* Di Kabupaten Nias Barat Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis Kinerja PKB/PLKB Dalam Mencapai Keberhasilan Keluarga Berencana Dengan Menggunakan Metode *Performance Appraisal* Di Kabupaten Nias Barat Tahun 2021.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui kinerja PKB/PLKB menggunakan metode *performance appraisal* efektifitas dan efisien dalam mencapai keberhasilan Keluarga Berencana di Kabupaten Nias Barat Tahun 2021.
2. Mengetahui kinerja PKB/PLKB menggunakan metode *performance appraisal* tanggungjawab dalam mencapai keberhasilan Keluarga Berencana di Kabupaten Nias Barat Tahun 2021.
3. Mengetahui kinerja PKB/PLKB menggunakan metode *performance appraisal* disiplin dalam mencapai keberhasilan Keluarga Berencana di Kabupaten Nias Barat Tahun 2021.
4. Mengetahui kinerja PKB/PLKB menggunakan metode *performance appraisal* inisiatif dalam mencapai keberhasilan Keluarga Berencana di Kabupaten Nias Barat Tahun 2021.
5. Mengetahui yang paling dominan kinerja PKB/PLKB menggunakan metode *performance appraisal* dalam mencapai keberhasilan Keluarga Berencana di Kabupaten Nias Barat Tahun 2021

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pendidikan

Sebagai referensi mengenai Kinerja PKB/PLKB Dalam Pencapaian Keberhasilan Keluarga Berencana dengan Menggunakan metode *Performance Appraisal*.

1.4.2 Bagi Pelayan Kesehatan

Sebagai masukan kepada petugas penyuluhan keluarga berencana agar lebih meningkatkan kinerja dalam pencapaian keberhasilan keluarga berencana.

1.4.3 Bagi Responden

Menjadi masukan kepada responden untuk memahami keluarga berencana.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi tambahan kepada peneliti selanjutnya dengan variabel penelitian sejenis.